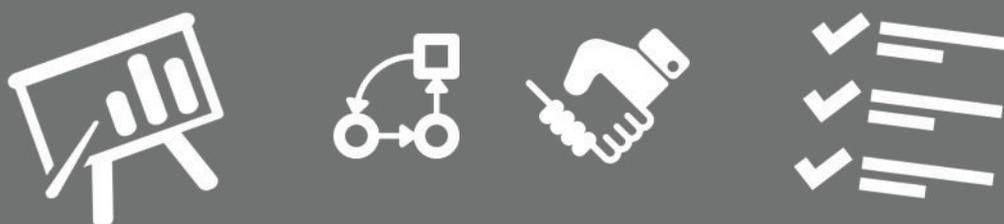
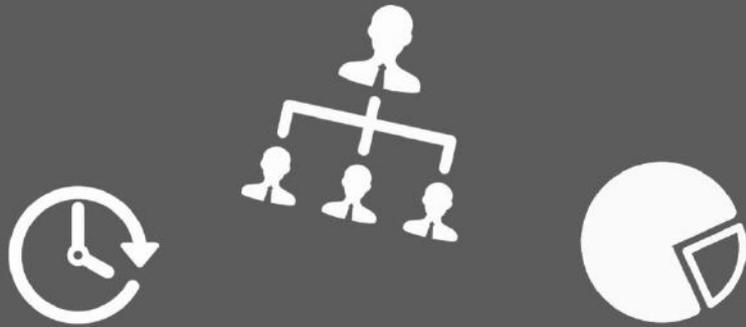




LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2016





LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
2016



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama BPS sebagai unit kerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Sekretariat Utama yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Sekretariat Utama BPS.

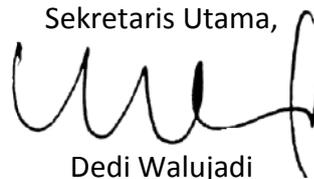
Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016, perkembangan capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap periode Renstra sebelumnya, capaian kinerja Sekretariat Utama BPS terhadap target Renstra Sekretariat Utama BPS 2015-2019, serta penyerapan anggaran Sekretariat Utama BPS 2016. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Sekretariat Utama BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 31 Maret 2017

BADAN PUSAT STATISTIK

Sekretaris Utama,



Dedi Walujadi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.3 Landasan Hukum	6
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Harapan dan Tantangan	9
BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja	11
2.1 Rencana Strategis 2015-2019	13
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Anggaran Tahun 2016	20
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016	25
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Renstra 2015-2019	37
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016	40
Bab IV Penutup	43
Lampiran	47

Daftar Tabel

Tabel

1	Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama.....	18
2	Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 (Miliar Rupiah)	20
3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2016	21
4	Rata-rata Capaian Kinerja Sestama Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016	25
5	Capaian Kinerja Tujuan Pertama Sekretariat Utama: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tahun 2016	27
6	Capaian Kinerja Tujuan Kedua Sekretariat Utama: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tahun 2016	32
7	Capaian Kinerja Tujuan Ketiga Sekretariat Utama: Peningkatan Pelayanan Perkantoran Tahun 2016	36
8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2016 dan 2019	37
9	Realisasi Pagu Sekretariat Utama menurut jenis Belanja TA 2016 (Miliar Rupiah)	40
10	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2016	41

Daftar Gambar

Gambar

1	Struktur Organisasi Sekretariat Utama	6
2	Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja	8
3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	9
4	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 2015- 2019	14
5	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	15
6	Peta Strategi Sekretariat Utama BPS	16
7	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2012 – 2016	26
8	Predikat Akuntabilitas Keuangan BPS Tahun 2012-2015	28
9	Jumlah Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Menurut Instansi Tahun 2016	32

Daftar Lampiran

Lampiran

1	Rencana Strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2015-2019	49
2	Pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik	53
3	Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2016	57
4	Jumlah Pejabat Fungsional pada Badan Pusat Statistik Keadaan: Akhir Tahun 2016	59
5	Jumlah Pegawai BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2016	61
6	Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama BPS Menurut Jenjang Pendidikan	63

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas mencakup lengkap, akurat, mutakhir (*up to date*), berkelanjutan, dan relevan dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, terutama dalam hal pelayanan data dan informasi statistik, BPS dituntut untuk terus memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Hal ini tentunya tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis statistik, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sekretariat Utama merupakan unit kerja eselon I BPS yang melaksanakan kegiatan BPS namun bersifat non teknis (bersifat administrasi), seperti kegiatan perencanaan dan

penganggaran, kegiatan administrasi terkait pengelolaan keuangan, kegiatan terkait pengembangan sumber daya manusia, kegiatan terkait kehumasan atau sosialisasi kegiatan statistik BPS, dan sebagainya. Dengan kata lain, keberadaan Sekretariat Utama BPS sangat menunjang keberhasilan kegiatan teknis statistik BPS.

Fungsi Sekretariat Utama BPS dijalankan melalui dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Adapun aktivitas Sekretariat Utama BPS tahun 2016 antara lain Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPS, Penataan Administrasi Keuangan, Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, Sosialisasi Kegiatan BPS 2016, Pengelolaan BMN BPS, Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional, dan Penyelenggaraan Program D-IV.

Untuk mengukur keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam pencapaian kegiatan tahun 2016, maka pada awal tahun 2016 telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS 2016. Sedangkan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BPS 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPS periode 2015-2019, sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Utama BPS berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Sekretariat Utama BPS mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BPS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- 2) Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- 4) Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

c. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, adapun susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama BPS yaitu:

1) Biro Bina Program

Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

2) Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

3) Biro kepegawaian

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan jabatan fungsional.

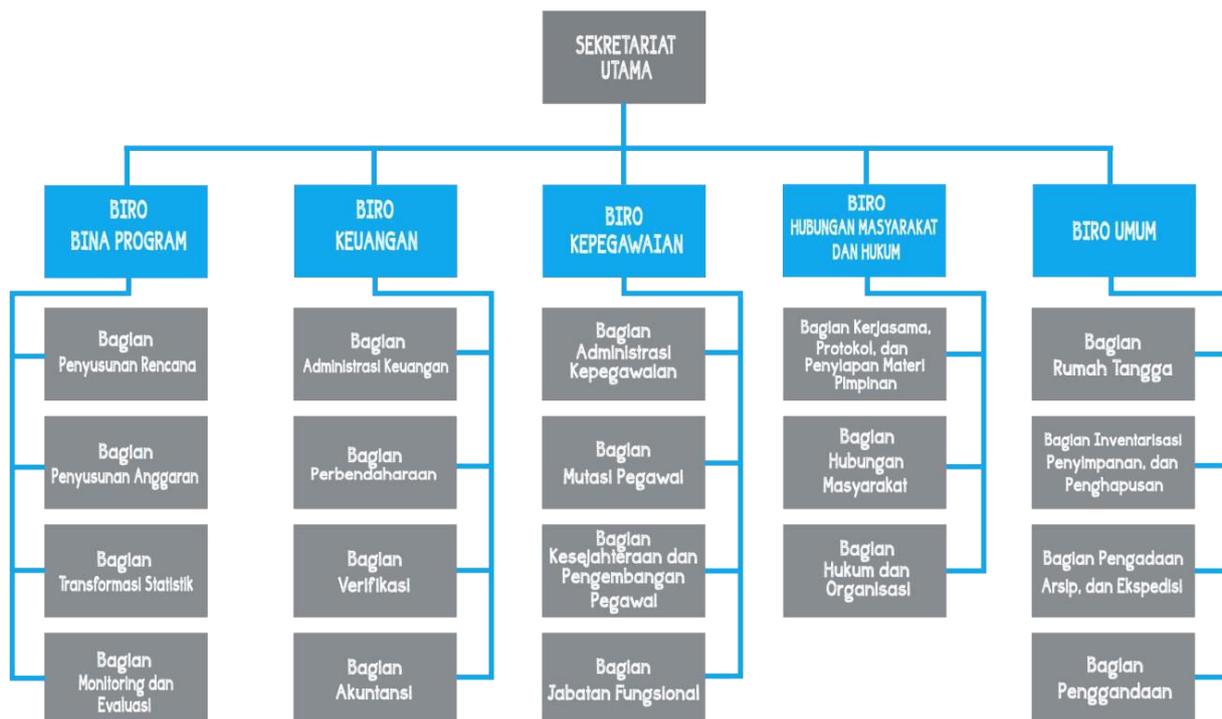
4) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

5) Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, layanan pengadaan, arsip, ekspedisi, dan penggandaan.

Struktur organisasi Sekretariat Utama BPS secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama

1.3 Landasan Hukum

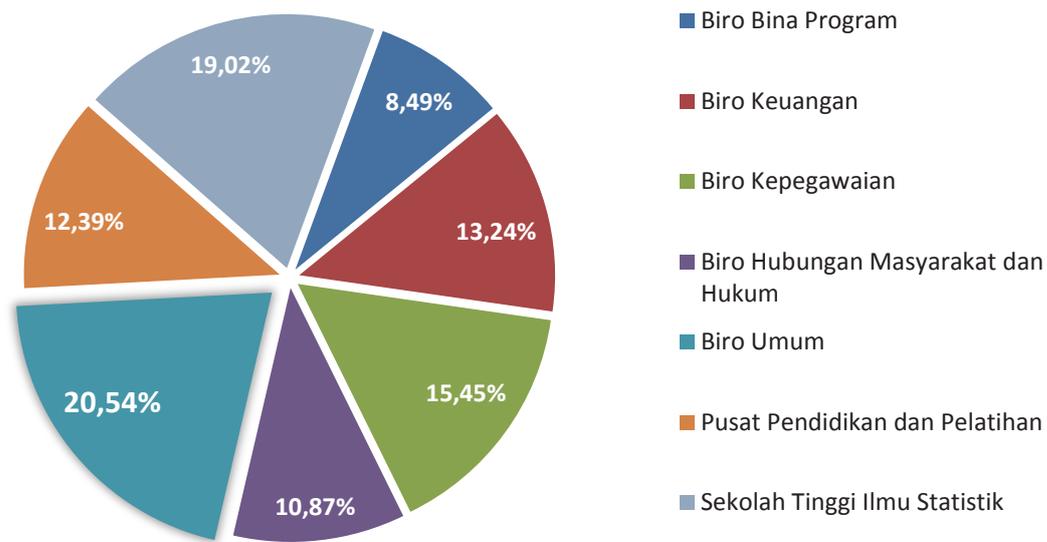
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BPS dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala badan Pusat Sttaistik Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

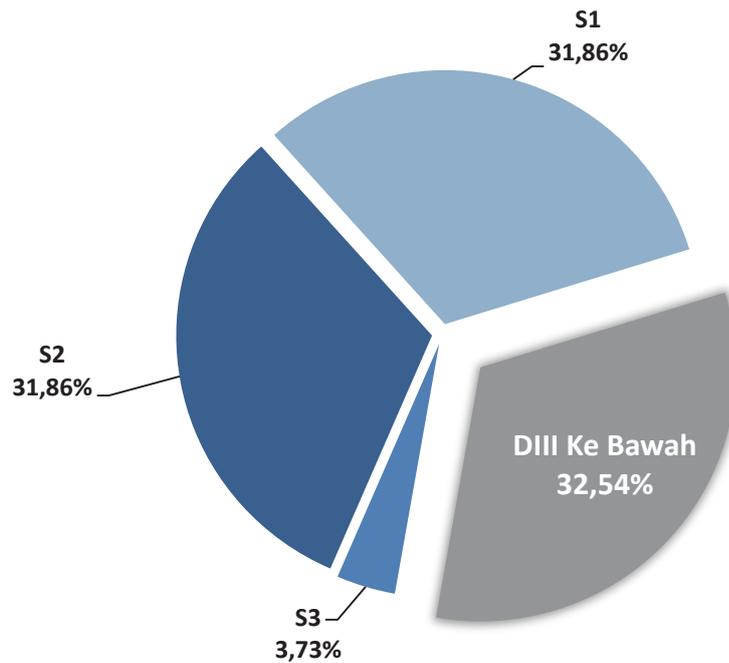
1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dengan kata lain, sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Tentunya sumber daya manusia dengan kualitas dan kapabilitas yang baik yang diharapkan suatu organisasi. Tahun 2016, jumlah pegawai di lingkup Sekretariat Utama BPS yaitu sebanyak 590 orang, dengan komposisi untuk masing-masing unit kerja sebagai berikut:



Gambar 2. Proporsi Pegawai menurut Unit Kerja

Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa alokasi pegawai terbanyak ada pada unit kerja Biro Umum dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dengan jumlah pegawai masing-masing sebanyak 121 orang dan 112 orang. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk menangani pekerjaan pada unit kerja masing-masing. Namun apabila dilihat dari jenjang pendidikan, terdapat perbedaan pada komposisi keduanya, pada Biro Umum persentase terbesar adalah pegawai adalah berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebesar 52,07 persen. Sedangkan pada STIS dimana sebagian besar pegawainya merupakan dosen, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 ke atas yaitu sebesar 73,21 persen. Komposisi Pegawai di Sekretariat Utama menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Secara umum jika dilihat menurut tingkat pendidikan maka jumlah terbesar adalah pegawai dengan pendidikan DIII kebawah yaitu sebanyak 192 pegawai (35,54 persen). Selanjutnya pegawai dengan pendidikan S2 dan S1 jumlahnya sama banyak yaitu 188 pegawai (31,86 persen). Terakhir, pegawai dengan pendidikan S3 sebanyak 22 pegawai (3,73 persen). Informasi lebih lengkap tentang jumlah pegawai di lingkungan Sestama menurut pendidikan dapat dilihat pada lampiran 6.

1.5 Harapan dan Tantangan

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap pelayanan prima di Bidang Administrasi menjadi tantangan untuk meningkatkan peran Sekretariat Utama BPS sebagai unit organisasi yang melayani dan menjalankan tugas di bidang administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang teknis. Tantangan perubahan yang dihadapi Sekretariat Utama BPS antara lain:

1. Tuntutan pemerintah agar Kementerian/Lembaga memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*, yang bisa dilakukan antara lain:

- Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan BPS.
 - Peningkatan perencanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan yang direncanakan dan tepat guna.
2. Amanat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, yang menyatakan bahwa fungsi Sekretariat Utama adalah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, sinkronisasi, integrasi, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Hal ini bisa dilakukan antara lain:
- Peningkatan koordinasi antar unit di bawah lingkungan Sekretariat Utama BPS dalam penyelenggaraan administrasi pendukung kegiatan statistik yang saat ini masih belum optimal.
 - Peningkatan mutu pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) agar tenaga statistik profesional yang dihasilkan mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju.
 - Peningkatan mutu penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM aparatur BPS maupun instansi pemerintah.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang layak termasuk Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk seluruh satker BPS secara bertahap dan berdasarkan prioritas.
 - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan dan RB) dalam melakukan penataan kelembagaan BPS.
 - Peningkatan kerjasama dengan Kantor Statistik Negara lain sebagai upaya pembenahan bisnis proses kelembagaan efektif dan efisien yang mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang menjadi standar yang dianut oleh kantor statistik di dunia.



BAB II
RENCANA STRATEGIS
DAN
PENETAPAN KINERJA





BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019 Sekretariat Utama BPS

Sekretariat Utama BPS, dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019 yang tentunya mengacu pada Renstra BPS Tahun 2015-2019. Renstra Sekretariat Utama BPS 2015-2019 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekreatriat Utama BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Sekretariat Utama BPS mempunyai visi yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi yang efektif, efisien, terpadu, dan berkualitas”.

b. Misi

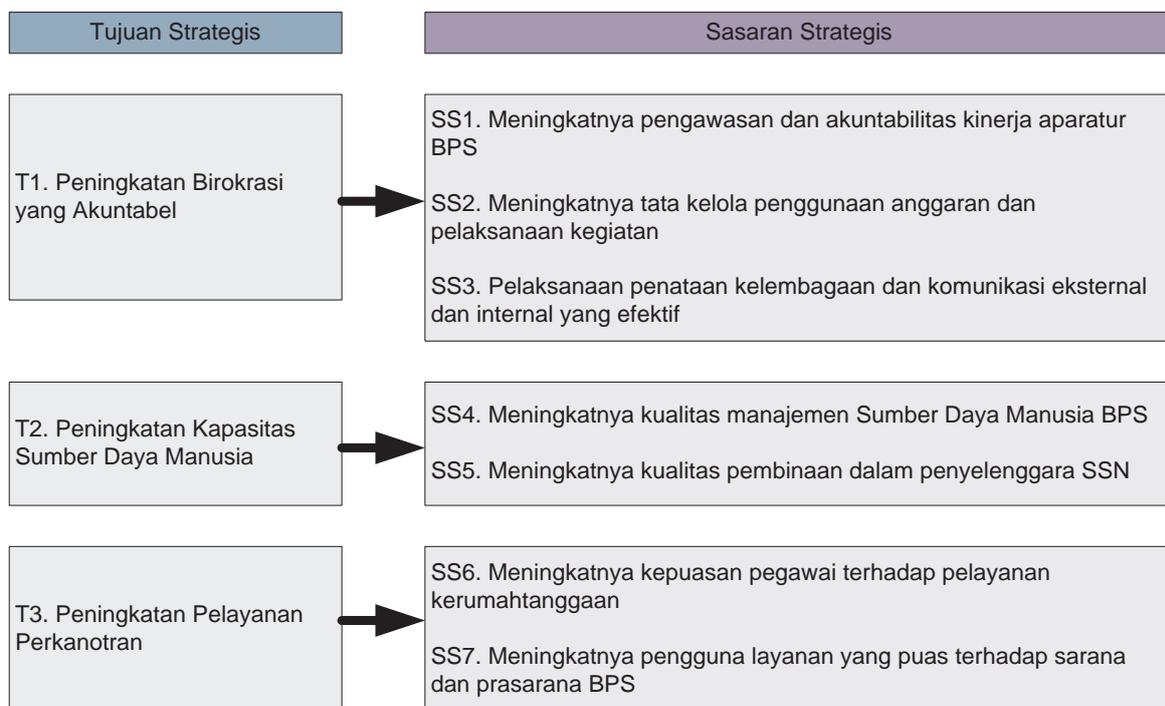
Untuk mencapai visi tersebut, maka Sekretariat Utama BPS menentukan misi yaitu:

- 1) Menyediakan informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, efektif dan efisien bagi pemanfaat layanan dan *stakeholder*;

- 2) Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan administrasi dalam kerangka pelaporan yang andal, efektif, dan efisien; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir, dan sistem administrasi yang berlaku.

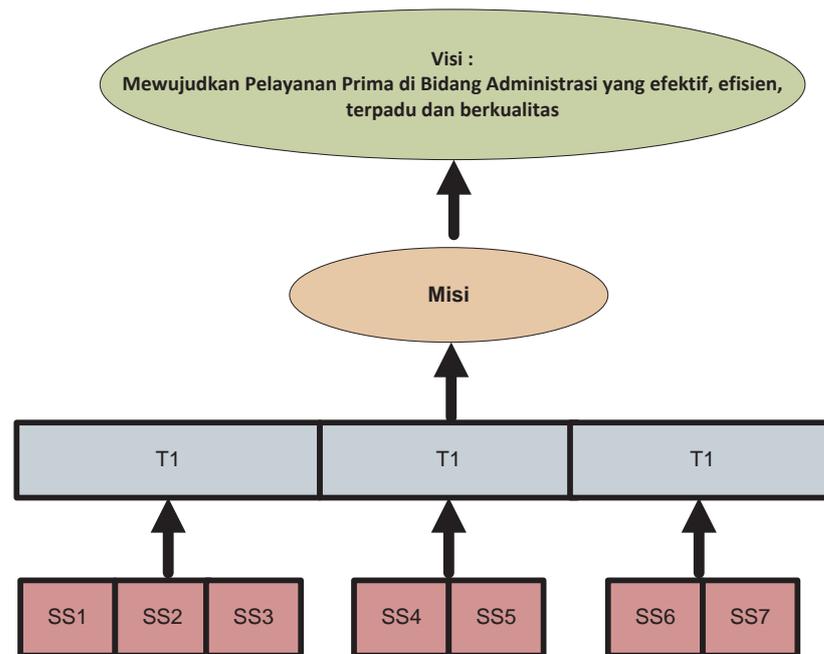
c. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS

Sekretariat Utama BPS mempunyai tiga tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Sekretariat Utama BPS periode 2015-2019. Tujuan Sekretariat Utama BPS tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Utama BPS 2015-2019

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauhmana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama BPS dapat terlihat pada gambar 5.



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

d. Peta Strategi Sekretariat Utama BPS

Tujuh sasaran strategis Sekretariat Utama BPS memiliki keterkaitan dan kemampuan saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BPS tahun 2015-2019. Guna mengkomunikasikan sasaran strategis tersebut kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Utama BPS, maka disusunlah peta strategi dengan menggunakan 4 perspektif dalam *Balanced Scorecard*, yaitu:

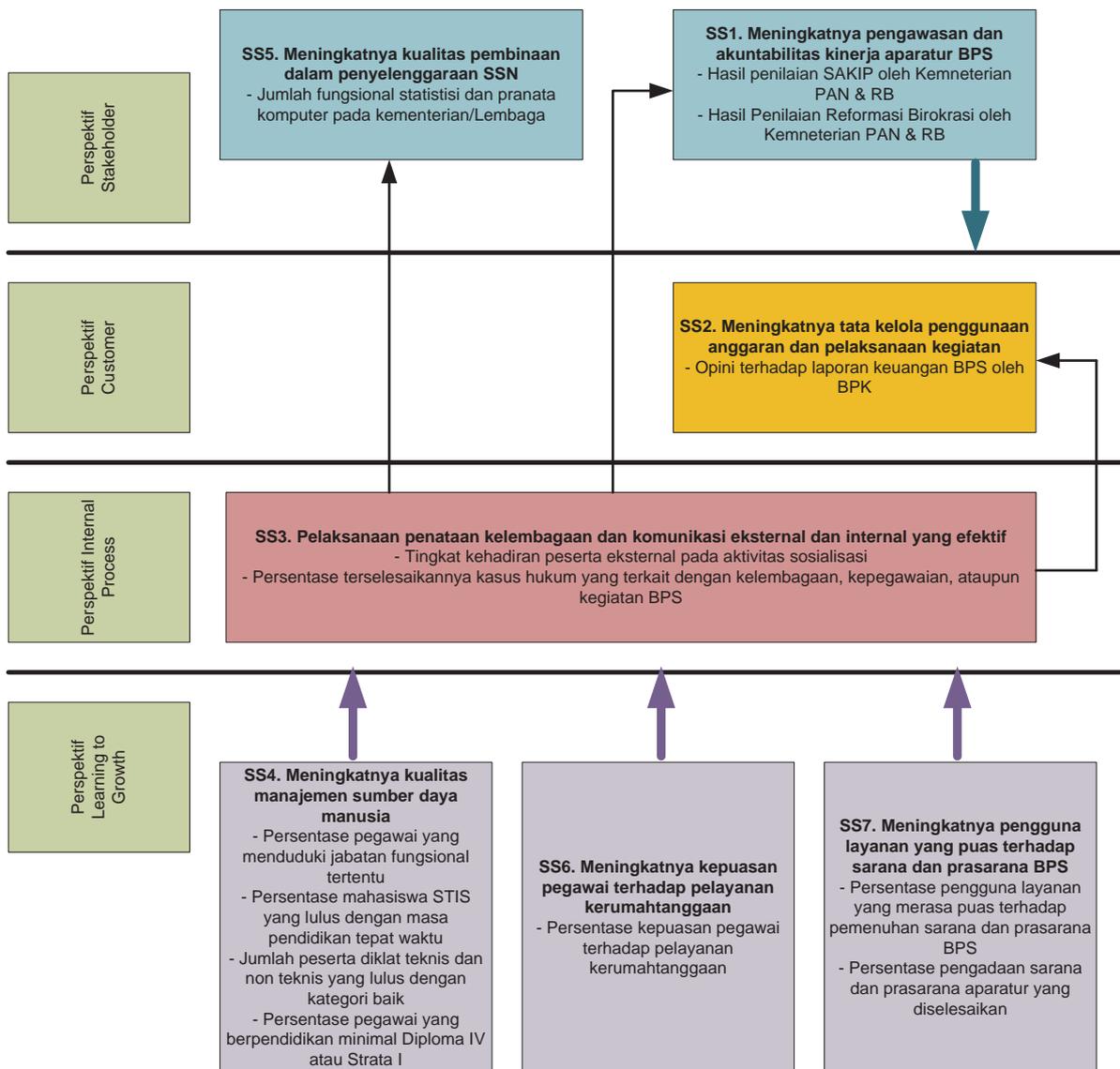
- Perspektif *Customer*
Merupakan perspektif yang berorientasi pada peminfaat atas layanan yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS.
- Perspektif *Stakeholder*
Penentuan perspektif ini yaitu mengidentifikasi siapa yang merupakan *stakeholder* organisasi dan menentukan kepentingan khusus apa yang kira-kira dimiliki para *stakeholder*. Selain itu perlu memperhatikan kedudukan masing-masing *stakeholder* terhadap keputusan dan tindakan institusi serta bagaimana mengelola hubungan yang baik dengan *stakeholder* tersebut. Mengingat *stakeholder* Sekretariat Utama BPS dibagi 2 (dua) yaitu *stakeholder internal (subject matter)* dan *stakeholder eksternal* (Bappenas, Kemenkeu, Kemenpan dan RB, dll).

- Perspektif *Internal Business Process*

Merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pemanfaat layanan dan *stakeholder* atas produk dan atau jasa yang dihasilkan oleh Sekretariat Utama BPS.

- Perspektif *Learning and Growth*

Merupakan perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.



Gambar 6. Peta Strategi Sekretariat Utama BPS

e. Kebijakan Sekretariat Utama BPS

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama BPS mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang administrasi serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada berbagai kegiatan administrasi;
2. Mengembangkan sistem administrasi terpadu secara bertahap untuk mendukung kelancaran tugas administrasi;
3. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima;
4. Melaksanakan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

f. Program yang Dilaksanakan oleh Sekretariat Utama BPS

Program yang dijalankan oleh Sekretariat Utama ada 2 (dua) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi pegawai. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BPS. Kedua program generik ini juga dilakukan di lingkungan BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Sekretariat Utama BPS telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik yaitu sebagai berikut:

IKU yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam IKU pada tingkat unit kerja Eselon II. Karena itu setiap unit kerja Eselon II mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Sestama. Peranan unit kerja Eselon II dilingkungan Sestama pada setiap penyusunan target indikator Sestama dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Capaian Kinerja Sekretaris Utama

Tujuan/Sasaran/Indikator	Biro Bina Program	Biro Keuangan	Biro Kepegawaian	Biro Humas dan Hukum	Biro Umum	Pusdiklat	STIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel							
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*	*					
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	*						
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	*	*	*	*	*	*	*
Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan							
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*	*					
Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif							
Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi				*			
Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.				*			

Tujuan/Sasaran/Indikator	Biro Bina Program	Biro Keuangan	Biro Kepegawaian	Biro Humas dan Hukum	Biro Umum	Pusdiklat	STIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia							
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga			*				
Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS							
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu			*				
Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu							*
Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik						*	
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I			*				
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN							
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga			*				
Tujuan 3. Peningkatan pelayanan perkantoran							
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					*		
Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan							
Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan					*		
Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS							
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					*		
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan					*		

2.3 Anggaran Tahun 2016

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 548,73 miliar. Pagu tersebut dibagi kedalam dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 515,39 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 33,34 miliar. Secara khusus pada program DMPTTL terdapat pagu dengan sumber dana berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 119,53 miliar dan Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 11,03 miliar, yang penggunaannya diperuntukan bagi Program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP CERDAS).

Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 (Miliar Rupiah)

Program / Sumber Dana	Hibah Langsung Dalam Negeri	Hibah Langsung Luar Negeri	Pinjaman Luar Negeri	Penerimaan Non Pajak	Rupiah Murni	Rupiah Murni Pendamping	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 DMPTTL	0,00	0,00	119,53	9,36	375,47	11,03	515,39
02 PSPA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34
Total	0	0	119,53	9,36	408,81	11,03	548,73

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2016

Pada awal tahun 2016, Sekretariat Utama BPS telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Sekretariat Utama BPS dalam memenuhi tugasnya di tahun 2016. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Utama yang merupakan bentuk komitmen Sekretaris Utama kepada kepala BPS. Perjanjian Kinerja untuk Sekretariat Utama dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama BPS selepas DIPA anggaran 2016 ditetapkan. Berikut tabel penetapan kinerja Sekretariat Utama BPS tahun 2016 untuk masing-masing indikator sasaran.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BPS Tahun 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	78,00
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	76,00
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	75,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	95,00
Tujuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.700
2.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	27,00
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	98,00
	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Peserta	985
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	60,00
2.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.700
Tujuan 3. Peningkatan pelayanan perkantoran	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	70,00
3.1. Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	Persen	65,00

Sasaran Strategis (1)	Indikator (2)	Satuan (3)	Target (4)
3.2. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	70,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

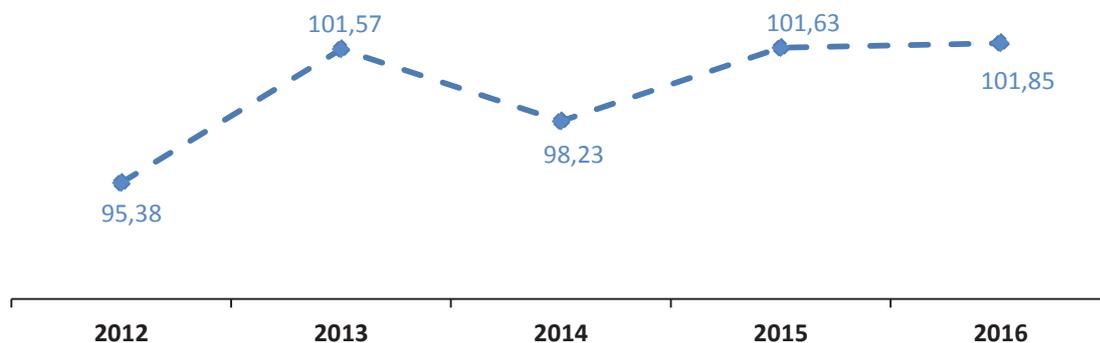
Capaian kinerja Sekretariat Utama BPS (Sestama) 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2016 dan data realisasinya dapat diperoleh.

Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Sestama Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	1	90,00
1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	2	97,86
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1	90,00
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan	2	110,00

Tujuan/Sasaran/Indikator	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
komunikasi eksternal dan internal yang efektif		
2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia	1	97,30
2.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	4	99,82
2.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	1	97,30
3. Peningkatan pelayanan perkantoran	1	120,00
3.1. Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	1	107,69
3.2. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS	2	107,03
Rata Rata Tujuan		102,43
Rata Rata Sasaran		101,85

Secara umum, kinerja Sestama Tahun 2016, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan periode Renstra Sestama 2015-2019 bisa dikatakan cukup berhasil dengan rata-rata pencapaian tujuan sebesar 102,43% sedangkan rata-rata sasaran strategis mencapai 101,85%. Jika dilihat perkembangan capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, terjadi peningkatan selama dua tahun berturut turut. Pada tahun 2014 capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,23 persen, naik di tahun 2015 menjadi 101,63 persen, dan meningkat lagi menjadi 101,85 persen di tahun 2016.



Gambar 7. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2012 – 2016

Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 4 Renstra BPS 2015-2019. Dalam pelaksanaannya tujuan BPS tersebut diturunkan pada dua Unit Kerja eselon I yaitu Sestama dan Inspektorat Utama. Pada Sestama Tujuan BPS tersebut dinyatakan dalam tujuan pertama dokumen PK Sestama tahun 2016.

Akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut berdasarkan:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan Pertama Sekretariat Utama: Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Tahun 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	90,00	90,00	WTP	-10,00
1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	78,00	74,72	95,79	73,86	1,16
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	76,00	75,95	99,93	70,34	7,98
Rata Rata Sasaran			97,86		
1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan					

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	90,00	90,00	WTP	-10,00
Rata Rata Sasaran			90,00		
1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif					
Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75,00	114,00	120,00	75,00	52,00
Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	100,00	100,00	100,00	95,00	5,26
Rata Rata Sasaran			110,00		

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan BPS memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap akuntabilitas keuangan BPS pada tahun 2015. Hasil penilaian yang diserahkan pada tahun 2016 ini mengalami penurunan karena selama kurun waktu 2011-2014 BPS selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut BPK, temuan yang harus menjadi perhatian adalah (1) Penjualan Data dan Informasi di Sekretariat Utama (Sestama) belum dapat dipantau frekuensi penjualannya sehingga berpotensi tidak dilaporkan; (2) Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan persediaan kurang memadai; (3) Pertanggungjawaban belanja barang yang menghasilkan persediaan tidak sesuai dengan ketentuan.



Gambar 8. Predikat Akuntabilitas Keuangan BPS Tahun 2012 - 2015

SS1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Sebagaimana tujuan pertama dari IKU Sestama, sasaran strategis “**Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS**” merupakan hasil *cascading* dari Sasaran Strategis yang sama pada Dokumen PK BPS Tahun 2016. Meskipun memiliki deskripsi sasaran yang sama, namun tidak semua indikator di dalamnya diturunkan menjadi tanggung jawab Sestama. Dari tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan sasara BPS tersebut, dua diantaranya menjadi tanggung jawab Sestama yaitu : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB” dan “Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB”

Telah dijelaskan di atas, bahwa bukan hanya akuntabilitas keuangan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS.

Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB

BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di pusat maupun di daerah. Dari sisi pengukuran keberhasilan telah dilakukan reuiu IKU melalui Perka BPS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Utama Badan Pusat Statistik, yang kemudian diikuti dengan reuiu Renstra 2015-2019. Perbaikan lainnya dilakukan dengan Pembinaan SDM di bidang SAKIP pada 10 provinsi.

Pada tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 74,72 atas pelaksanaan AKIP BPS. Hasil penilaian tersebut lebih kecil dari target 2016 yang sebesar 78,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 95,79 persen. Meskipun tidak mencapai target, jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2015, capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan sebesar 1,16 persen.

Rekomendasi diberikan oleh KemenPAN dan RB untuk pelaksanaan AKIP di tahun selanjutnya antara lain: (1) melakukan integrasi aplikasi perencanaan kinerja, aplikasi keuangan, dan manajemen kinerja. (2) Memanfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai dari eselon IV keatas sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. (3) Meningkatkan kualitas evaluasi program sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti unit kerja. (4) Mengoptimalkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi yang dibangun.

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPS Tahap II (2015-2019). Fokus kegiatan pelaksanaan RB BPS pada tahun 2016 merupakan kegiatan tindak lanjut sesuai rekomendasi evaluasi KemenPAN dan RB pada tahun 2015 yang diselaraskan dengan Program Statcap Cerdas.

Kegiatan pada masing-masing area perubahan RB BPS melekat pada *subject matter* dan unit kerja pendukung terkait, misalnya evaluasi harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala yang dilakukan oleh Biro Humas dan Hukum, pembangunan sistem dan uji coba SKP *online* pada Area Perubahan Penataan Tatalaksana dengan melibatkan Biro Bina Program, Biro Kepegawaian dan Direktorat Neraca Produksi sebagai penanggungjawab, pengembangan SDM berbasis kompetensi oleh Biro Kepegawaian, implementasi SPIP oleh Inspektorat, peningkatan pelayanan publik oleh Direktorat Diseminasi Statistik, dan Reviu Renstra BPS 2015-2019 oleh Biro Bina Program. Guna mendukung gerakan Revolusi Mental sesuai surat Edaran MenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2016, sudah disusun *Road Map* revolusi mental BPS dan internalisasi nilai-nilai revolusi mental melalui *workshop*, baliho, komik dan *fanpage* RB BPS.

Pada tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 75,95 atas pelaksanaan RB BPS. Hasil penilaian lebih kecil dari target 2016 yang sebesar 76,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 99,93 persen. Meskipun tidak mencapai target, jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2015, capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen.

Rekomendasi yang diberikan oleh KemenPAN dan RB untuk pelaksanaan RB di tahun selanjutnya antara lain: (1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kemajuan “agen perubahan”. (2) Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya. (3) Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching* dan konseling secara berkala. (4) Membuat penerapan sistem integritas. (5) Reviu dan SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik. (6) Segera menindaklanjuti penancangan zona integritas.

SS1.2 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Penjelasan untuk sasaran ini dapat dilihat pada penjelasan tujuan 1. mengingat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini sama dengan indikator yang digunakan pada tujuan 1. Sebagai tambahan Informasi indikator ini pelaksanaannya diturunkan menjadi tanggung jawab Biro Keuangan.

SS1.3 Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif

SS ini bukan merupakan *hasil cascading* dari IKU BPS melainkan merupakan SS terkait dari Tugas dan Fungsi Sestama. SS yang kinerjanya diukur melalui dua indikator pada pelaksanaannya diturunkan kepada Biro Humas dan Hukum. Ada dua indikator untuk mengukur sasaran ini, yaitu tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi dan persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS. Sasaran pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif bisa dikatakan sudah tercapai dengan rata-rata capaian kinerja indikatornya mencapai 110 persen. Sedangkan jika dilihat per indikator sarannya, keduanya masing-masing memiliki capaian kinerja sebesar 120 persen dan 100 persen. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 capaian kinerja kedua indikator mengalami peningkatan sebesar 52,00 persen dan 5,26 persen.

Tujuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia

Tujuan kedua ini merupakan peran Sekretariat Utama BPS diantaranya menyediakan sumber daya manusia BPS baik pusat maupun daerah yang berkompeten di bidangnya guna mendukung keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan mengembangkan penataan kelembagaan demi terselenggara dan terwujudnya *good governance*. Keberhasilan tujuan tersebut diwakili melalui satu indikator yaitu “Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga”.

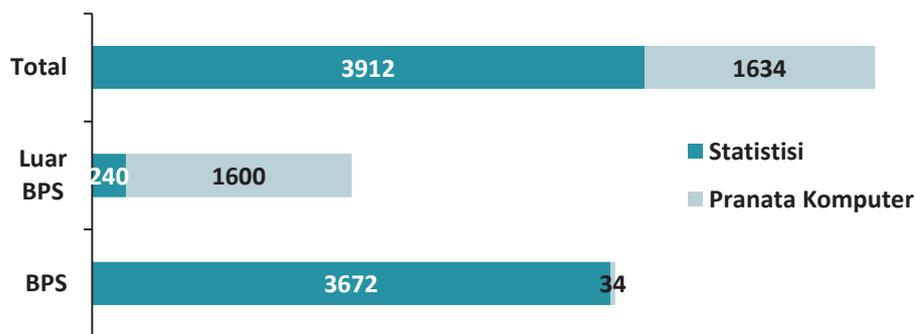
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) Nomor 19 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya menugaskan BPS sebagai Instansi Pembina Jabatan tersebut. Selain itu, BPS juga merupakan Instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata komputer sebagaimana tertera dalam Keputusan MenPAN dan RB Nomor 66JKEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Keberhasilan tugas ini diukur melalui IKU “Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga”.

Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada kementerian/lembaga pada tahun 2016 sebanyak 5.546 pegawai. Jumlah ini lebih kecil dari target tahun 2016 yang sebanyak 5.700 pegawai, namun lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 5.278 pegawai.

Jika dirinci menurut jenis fungsional, yang tidak tercapai jumlahnya adalah jabatan fungsional statistisi. Pada tahun 2016 direncanakan jumlah pegawai yang menjabat fungsional statistisi sebanyak 4.100 pegawai, namun hanya tercapai sebanyak 3.912 pegawai. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan sejumlah pegawai terbebas dari jabatan tersebut seperti pensiun, menjadi pejabat struktural, atau mengikuti program tugas

belajar. Adapun untuk jabatan fungsional pranata komputer targetnya terpenuhi. Tercatat jumlah pegawai yang menduduki jabatan tersebut pada tahun 2016 sebanyak 1634 pegawai lebih besar dari target yang sebanyak 1.600 pegawai.

Pada Gambar 9 tercatat jumlah pejabat fungsional statistisi pada kementerian/lembaga sebanyak 3.912 pegawai dan sebanyak 3.672 diantaranya bertugas di BPS. Sementara itu dari 1.634 pejabat fungsional pranata komputer hanya 34 pejabat yang bertugas di BPS. Agar SSN semakin terwujud, kedepan pembinaan fungsional statistisi harus lebih ditingkatkan terutama pada instansi luar BPS mengingat dimasa mendatang data administrasi akan menjadi sumber utama data dan informasi statistik. Sedang pembinaan fungsional pranata komputer ditingkatkan terutama di dalam internal BPS.



Gambar 9. Jumlah Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Menurut Instansi Tahun 2016

Untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS dan meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggara SSN. Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan Kedua Sekretariat Utama: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tahun 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia					
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5700	5546	97,30	5278	5,08
2.1. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	27,00	24,80	91,85	25,00	-0,80
Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	98,00	98,00	100,00	99,00	-1,01
Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	985	1042	105,79	1588	-34,38
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	60,00	60,99	101,65	58,3	4,61
Rata Rata Sasaran			99,82		
2.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN					
Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5700	5546	97,30	5278	5,08
Rata Rata Sasaran			97,30		

SS2.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat mengharapkan hadirnya pemerintahan yang lebih tinggi kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik.

Sasaran “**Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS**” diukur keberhasilannya melalui empat indikator. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2016 mencapai 99,82 persen. Penjelasan tentang capaian masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut.

Persentase Pegawai Yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya PNS dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna, dan berhasil guna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Persentase pegawai BPS yang menduduki jabatan fungsional pada tahun 2016 sebesar 24,80 persen, sedikit dibawah target yang sebesar 27,00 persen. Besaran ini relatif sama jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 25,00 persen. Kedepan BPS perlu memperbanyak jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional agar data semakin berkualitas dan pelayanan prima terus meningkat.

Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu

Kualitas ahli statistik semakin ditingkatkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan di lapangan yang semakin besar terutama setelah diberlakukan otonomi daerah. Penyelenggaraan Program DIV di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dimaksudkan untuk meningkatkan SDM BPS dalam menghadapi tantangan tersebut. Lulusan program tersebut memiliki gelas Sarjana Sains Terapan (S.ST), terikat dengan status ikatan dinas, dan berkewajiban bekerja minimal 8 tahun di BPS setelah lulus dari pendidikan.

Pada tahun 2016, persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu mencapai 98 persen. Persentase tersebut sama dengan target kinerja pada tahun tersebut, artinya capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100,00 persen. Meskipun demikian, jika dibandingkan tahun 2015 terjadi penurunan kinerja sebesar 1,01 persen sebagaimana yang tercatat pada tabel 6.

Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik

Indikator ini pada pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS. Pada tahun 2016 Pusdiklat diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS antara lain : Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Pada tahun 2016, untuk memenuhi kompetensi pegawai dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah diselenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2016 jumlah peserta jumlah peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan kategori baik sebanyak 1 042 peserta. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang sebanyak 985 peserta, kinerja Sestama untuk indikator ini tercapai

dengan nilai capaian sebesar 105,79 persen. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebanyak 546 peserta (34,38 persen).

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Selain pembinaan pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional, kompetensi pegawai dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Sebagaimana dijelaskan pada bab pendahuluan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus dilakukan baik melalui STIS maupun melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar.

Peningkatan terjadi pada persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I. Pada tahun 2015 persentasenya sebesar 58,30 persen naik sebesar 1,69 poin menjadi 60,99 persen. Besaran tersebut juga sedikit lebih tinggi dari target 2015 yaitu 60,00 persen. Dengan demikian upaya BPS dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dapat dikatakan berhasil.

SS2.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran ini keberhasilannya diukur melalui satu indikator yang juga merupakan indikator dari tujuan kedua yaitu “Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga”. Penjelasan capaian indikator ini dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya.

Tujuan 3. Peningkatan pelayanan perkantoran

Keberhasilan fungsi Sestama dalam melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS di gambarkan dengan keberhasilan pada tujuan ketiga. Tujuan ini pada pelaksanaannya diselenggarakan oleh Biro Umum menggunakan anggaran pada dua program yaitu DMPTTL dan PSPA. Untuk melakukan penilaian keberhasilan pada tujuan ini digunakan satu indikator yaitu **Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS**

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian IKU yang juga merupakan salah satu Indikator kinerja keberhasilan Program PSPA BPS.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2016 mencapai 87,35 persen. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan target yang sebesar 70 persen dan realisasi tahun 2015 dengan persentase konsumen yang merasa puas sebesar 70,92 persen.

Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga Sekretariat Utama: Peningkatan Pelayanan Perkantoran Tahun 2016

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Realisasi 2015	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Peningkatan pelayanan perkantoran					
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	70,00	87,35	120,00	70,92	23,17
3.1 Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan					
Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	65,00	70,00	107,69	-	-
Rata Rata Sasaran			107,69		
3.2 Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS					
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	70,00	87,35	120,00	70,92	23,17
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100,00	94,05	94,05	98,33	-4,35
Rata rata Sasaran			107,03		

SS3.1. Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan

Pengukuran sasaran dinilai melalui satu sasaran yaitu Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan. Pengukuran indikator ini baru dilakukan pada tahun 2016 dengan persentase kepuasan pegawai sebesar 70,00 persen. Jika dibandingkan dengan targetnya yang sebesar 65,00 persen, sasaran ini dikatakan berhasil dengan capaian 107,69 persen.

SS3.2. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

Ada dua indikator yang mengukur sasaran meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS, yaitu persentase pengguna layanan yang

merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS serta persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan. Tahun 2016, rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS yaitu sebesar 107,03 persen, artinya sasaran ini bisa dikatakan sudah tercapai untuk tahun 2016. Apabila dilihat per indikator sasaran, dapat terlihat bahwa capaian indikator persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan hanya mencapai 94,05%, sedangkan capaian indikator persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS yaitu mencapai 120,00 persen artinya realisasi melebihi target yang ditentukan.

3.2 Capaian kinerja Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sestama BPS Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2016 dan 2019

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2016	Capaian Thd Target (%)	
	2016	2019		2016	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	90,00	90,00	90,00
SS1.1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	75,05	84,00	74,72	99,56	88,95
2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	70,00	79,00	75,95	108,50	96,14

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2016	Capaian Thd Target (%)	
	2016	2019		2016	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1.2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan					
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	90,00	90,00	90,00
SS1.3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif					
1. Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75,00	75,00	114,00	120,00	120,00
2. Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	95,00	95,00	100,00	105,26	105,26
Tujuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia					
1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5533	5963	5546	100,23	93,01
SS2.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					
1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	30,00	45,00	24,80	82,67	55,11
2. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	98,00	99,00	98,00	100,00	98,99
3. Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	182	188	1042	120,00	120,00
4. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	58,00	61,00	60,99	105,16	99,98
SS2.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN					
1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	5533	5963	5546	100,24	93,01
Tujuan 3. Peningkatan pelayanan perkantoran					
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65,00	65,00	87,35	120,00	120,00

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Renstra		Realisasi 2016	Capaian Thd Target (%)	
	2016	2019		2016	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS3.1. Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan					
1. Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	65,00	71,00	70,00	107,69	98,59
SS3.2. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS					
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65,00	65,00	87,35	120	120
2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100,00	100,00	94,05	94,05	94,05

Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 terhadap target Renstra 2016 dan 2019, capaian kinerja 13 indikator yang mewakili kinerja Sestama BPS untuk Periode Renstra 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator yang realisasi kinerjanya telah melampaui target Renstra 2016 dan 2019 sebanyak empat indikator yaitu: (1) Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi; (2) Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS; (3) Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik; (4) Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

Indikator yang realisasi kinerjanya sama atau telah melampaui target Renstra 2016 tetapi belum melampaui target 2019 sebanyak lima indikator yaitu : (1) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB ; (2) Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I; (3) Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga; (4) Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan;(5) Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu.

Indikator yang realisasi kinerjanya belum melampaui target Renstra baik tahun 2016 maupun tahun 2019 sebanyak empat indikator indikator yaitu : (1) Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK; (2) Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB ; (3)

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; (4) Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan.

Sebanyak dua indikator tidak dapat diukur keberhasilannya karena data realisasi kinerja kedua indikator tersebut pada tahun 2016 hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016

Pada tahun anggaran 2016 Sestama BPS menerima pagu sebesar Rp 548,73 miliar yang dengan komposisi terdiri dari 53,02 persen belanja operasional dan 46,98 persen belanja non operasional. Pada pelaksanaannya, akibat adanya penghematan anggaran Sestama BPS melakukan *self blocking* terhadap pagu sebesar Rp 6,52 miliar sehingga total pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 542,21 miliar. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sestama BPS menggunakan anggaran sebesar Rp 452,04 miliar dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 271,52 miliar dan belanja non operasional sebesar 180,52 miliar. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran Sestama BPS pada tahun 2016 mencapai 82,38 persen. Adapun Jika dibandingkan dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking* maka realisasi anggaran Sestama BPS mencapai 83,37 persen dengan rincian belanja operasional sebesar 93,33 persen dan belanja non operasional sebesar 71,84 persen.

Tabel 9. Realisasi Pagu Sekretariat Utama menurut jenis Belanja TA 2016 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	<i>Self Blocking</i>	Pagu- <i>Selfblocking</i>	Realisasi	Realisasi/ Pagu (%)	Realisasi/ Pagu-self blocking (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Operasional	290,93	-	290,93	271,52	93,33	93,33
Non Operasional	257,80	6,52	251,29	180,52	70,02	71,84
Total	548,73	6,52	542,21	452,04	82,38	83,37

Jika dirinci menurut sumber dana, perbandingan antara realisasi dengan pagu yang telah dikurangi *selfblocking*, persentase realisasi anggaran yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) menjadi yang terbesar yaitu 93,82 persen. Selanjutnya berturut-turut

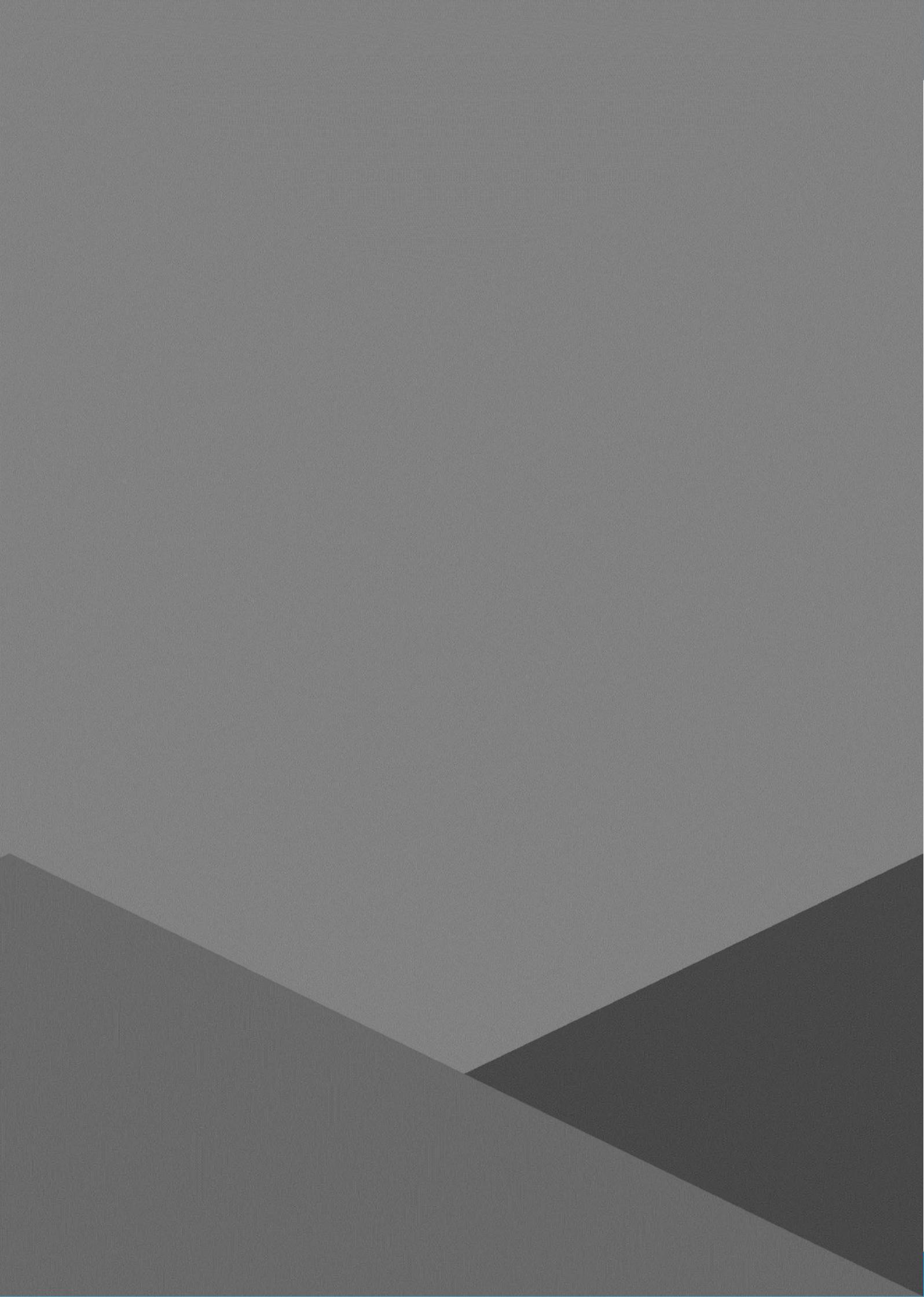
adalah Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar 88,59 persen, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar 85,84 persen. Terakhir, realisasi anggaran dari sumber dana pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi yang terkecil yaitu sebesar 47,54 persen. Sebagai tambahan informasi, anggaran yang bersumber dari RMP dan PLN sepenuhnya digunakan untuk mendukung Program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP CERDAS).

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

Program/ Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Self Bloking	Pagu - selfbloking	Realisasi/Pagu (%)	Realisasi/Pagu- self blocking (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 DMP TTL	515,39	422,66	2,84	512,56	82,01	82,46
PLN	119,53	56,83	0,00	119,53	47,54	47,54
PNP	9,36	8,29	0,00	9,36	88,59	88,59
RM	375,47	348,07	2,84	372,63	92,70	93,41
RMP	11,03	9,47	0,00	11,03	85,84	85,84
02 PSPA	33,34	29,38	3,68	29,65	88,13	99,08
RM	33,34	29,38	3,68	29,65	88,13	99,08
TOTAL	548,73	452,04	6,52	542,21	82,38	83,37
PLN	119,53	56,83	0,00	119,53	47,54	47,54
PNP	9,36	8,29	0,00	9,36	88,59	88,59
RM	408,81	377,45	6,52	402,28	92,33	93,82
RMP	11,03	9,47	0,00	11,03	85,84	85,84

BAB IV

PENUTUP





BAB IV PENUTUP

Kinerja Sestama BPS pada tahun 2016 dapat dikatakan memuaskan dengan capai kinerja tujuan sebesar 102,43 persen dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101,85. Jika dilihat perkembangannya terhadap target kinerja sasaran strategis setiap tahunnya juga menunjukkan trend yang positif. Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

Penajaman IKU

Agar pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran Sestama BPS menjadi lebih relevan, perlu dilakukan penajaman terhadap beberapa IKU. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya.

Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan dalam pengukuran pembinaan SDM perlu dipertajam. Pembinaan perlu dilakukan secara terus menerus agar SDM BPS tetap memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membina jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer, kinerja BPS dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan tersebut di seluruh instansi pemerintah juga harus terukur.

Penajaman Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator realisasinya jauh melampaui target akhir Renstra 2015-2019. Agar kinerja Sestama BPS terus meningkat, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) terhadap target kinerja pada beberapa indikator. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BPS
TAHUN 2015-2019

Instansi	:	Sekretariat Utama
Visi	:	Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Administrasi yang efektif, efisien, terpadu dan berkualitas
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi dan layanan administrasi yang prima, berkualitas, efektif, dan efisien bagi pemanfaat layanan dan <i>stakeholder</i>; 2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan administrasi dalam kerangka pelaporan yang andal, efektif, dan efisien; dan 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi mutakhir dan sistem administrasi yang berlaku.

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 2. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 3. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB 1.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB 2.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK 3.1. Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang administrasi serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada berbagai kegiatan administrasi 2. Mengembangkan sistem administrasi terpadu secara bertahap untuk mendukung kelancaran 	DMPPTL, PSPA

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	efektif	3.2. Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan,	tugas administrasi; 3. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih,	
2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia	4. Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS	4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 4.2. Persentase mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu 4.3. Jumlah peserta diklat teknis dan non teknis yang lulus dengan kategori baik 4.4. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	dan bertanggung jawab serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima 4. Melaksanakan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut <i>Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics (STATCAP-CERDAS)</i>	
3. Peningkatan pelayanan perkantoran	5. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggara SSN 6. Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan	5.1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga 6.1. Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan		

Tujuan	Sasaran Strategis		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kerumahtanggaan 7. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS	kerumahtanggaan 7.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 7.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan		

LAMPIRAN 2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dedi Walujadi, S.E, M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suryamin, M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Suryamin, M.Sc.
NIP. 19560805 197903 1 001

Jakarta, 23 Februari 2016
Pihak Pertama

Dr. Dedi Walujadi, S.E, M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	78,00
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point	76,00
Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Pelaksanaan Penataan Kelembagaan dan Komunikasi Eksternal dan Internal yang Efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	75,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	Persen	95,00
Tujuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.700
Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia BPS	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	27,00
	Persentase mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	98,00
	Jumlah peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan kategori baik	Peserta	985
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	60,00
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dalam Penyelenggaraan SSN	Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	5.700

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 3. Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	70,00
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumahtanggaan	Persen	65,00
Meningkatnya Pengguna Layanan yang Puas terhadap Sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	70,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00

Program**Anggaran**

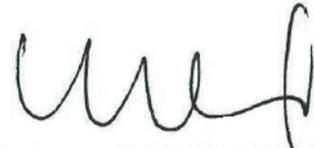
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 412.578.963.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 76.490.363.000 |
| Jumlah | Rp. 489.069.326.000 |

Pihak Kedua



Dr. Suryamin, M.Sc.
NIP. 19560805 197903 1 001

Jakarta, 23 Februari 2016
Pihak Pertama



Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

LAMPIRAN 3

**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPS
TAHUN 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	Trw I	0	0	0
			Trw II	WTP	WDP	90,00
			Trw III	WTP	WDP	90,00
			Trw IV	WTP	WDP	90,00
1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Poin	Trw I	0	0	-
			Trw II	0	0	-
			Trw III	0	0	-
			Trw IV	78,00	-	-
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Poin	Trw I	0	0	-
			Trw II	0	0	-
			Trw III	0	0	-
			Trw IV	76,00	-	-
1.2 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	Trw I	0	0	0
			Trw II	WTP	WDP	90,00
			Trw III	WTP	WDP	90,00
			Trw IV	WTP	WDP	90,00
1.3 Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif	Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	Trw I	75	114,00	120,00
			Trw II	75	114,00	120,00
			Trw III	75	114,00	120,00
			Trw IV	75	114,00	120,00
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	Trw I	100,00	100,00	100,00
			Trw II	100,00	100,00	100,00
			Trw III	100,00	100,00	100,00
			Trw IV	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2.: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	Trw I	5.350	5.450	95,61
			Trw II	5.460	5.508	96,63
			Trw III	5.585	5.497	96,44
			Trw IV	5.700	5.546	97,30

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1 Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	Trw I	24	24,80	103,33
			Trw II	25	24,80	99,20
			Trw III	26	24,80	95,38
			Trw IV	27	24,80	91,85
	Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	Persen	Trw I	0	0	-
			Trw II	98,00	98,00	100,00
			Trw III	98,00	98,00	100,00
			Trw IV	98,00	98,00	100,00
	Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Non Teknis yang lulus dengan Kategori Baik	Peserta	Trw I	217	205	94,47
			Trw II	439	487	110,93
			Trw III	707	715	105,78
			Trw IV	985	1.042	109,37
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	Trw I	60,00	59,6	99,33
			Trw II	60,00	60,40	100,67
			Trw III	60,00	60,67	101,12
			Trw IV	60,00	60,99	101,65
2.2 Meningkatkan kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga	Pegawai	Trw I	5.350	5.450	95,61
			Trw II	5.460	5.508	96,63
			Trw III	5.585	5.497	96,44
			Trw IV	5.700	5.546	97,30
Tujuan 3: Peningkatan pelayanan perkantoran	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	Trw I	0	0	0
			Trw II	0	0	0
			Trw III	0	0	0
			Trw IV	70,00	87,35	120,00
3.1 Meningkatkan Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan kerumah tanggaan	Persentase Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kerumah tanggaan	Persen	Trw I	15,00	15,00	100,00
			Trw II	30,00	29,00	96,67
			Trw III	45,00	40,00	88,89
			Trw IV	65,00	70,00	107,69
3.2 Meningkatkan pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	Trw I	0	0	0
			Trw II	0	0	0
			Trw III	0	0	0
			Trw IV	70,00	87,35	120,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	Trw I	7,00	11,57	120,00
			Trw II	15,00	50,90	120,00
			Trw III	54,00	70,01	120,00
			Trw IV	100,00	94,05	94,05

LAMPIRAN 4

Jumlah Pejabat Fungsional pada Badan Pusat Statistik

Keadaan: Akhir Tahun 2016

Jabatan Fungsional	Terampil				Ahli					Total
	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Sub Total	Pertama	Muda	Madya	Utama	Sub Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Analisis Kepegawaian	-	5	5	10	19	11	1		31	41
Arsiparis	5	3	-	8	1	-	-		1	9
Auditor	-	2	1	3	17	15	2	-	34	37
Dokter					1	-	2	-	3	3
Dokter Gigi					-	2	-	-	2	2
Dosen *					29	22	14		65	65
Peneliti					-	1	4	1	6	6
Penerjemah					1	-	-	-	1	1
Penyuluh Hukum					1	2	-	-	3	3
Perawat	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Perawat Gigi	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Perencana					-	1	-	-	1	1
Pranata Humas	-	-	1	1	1	2	-		3	4
Pranata Komputer	3	1	6	10	18	5	1	-	24	34
Pustakawan	1	1	-	2	2	-	-	-	2	4
Statistisi	898	567	902	2.367	822	470	13	-	1.305	3.672
Widyaiswara					-	13	7	-	20	20
Jumlah	907	579	916	2.402	912	545	44	1	1.502	3.904

LAMPIRAN 5

Jumlah Pegawai BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2016

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Sekretariat Utama	29	428	669	329	1.455
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2	29	22	20	73
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	11	71	12	18	112
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	1	20	300	227	548
BPS Provinsi Sumatera Utara	-	103	357	345	805
BPS Provinsi Sumatera Barat	2	43	226	170	441
BPS Provinsi Riau	-	32	179	158	369
BPS Provinsi Jambi	-	37	141	132	310
BPS Provinsi Sumatera Selatan	-	40	252	149	441
BPS Provinsi Bengkulu	-	33	149	68	250
BPS Provinsi Lampung	-	46	192	191	429
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	16	110	55	181
BPS Provinsi Kepulauan Riau	-	19	107	70	196
BPS Provinsi DKI Jakarta	1	39	80	105	225
BPS Provinsi Jawa Barat	-	91	420	532	1.043
BPS Provinsi Jawa Tengah	1	171	503	642	1.317
BPS Provinsi D I Yogyakarta	1	70	102	74	247
BPS Provinsi Jawa Timur	1	182	473	512	1.168
BPS Provinsi Banten	-	30	133	161	324
BPS Provinsi Bali	1	41	128	95	265
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	18	185	123	326
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	24	314	202	540
BPS Provinsi Kalimantan Barat	-	40	170	142	352
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	-	18	208	99	325
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	-	27	166	169	362
BPS Provinsi Kalimantan Timur	1	29	242	107	379
BPS Provinsi Sulawesi Utara	-	20	208	108	336
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	-	24	188	112	324
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	-	50	354	270	674
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	-	25	175	199	399
BPS Provinsi Gorontalo	-	10	114	53	177

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Sulawesi Barat	-	22	87	74	183
BPS Provinsi Maluku	-	15	132	112	259
BPS Provinsi Maluku Utara	-	17	114	88	219
BPS Provinsi Papua Barat	-	13	187	61	261
BPS Provinsi Papua	-	16	244	169	429
Jumlah	51	1.909	7.643	6.141	15.744

* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

LAMPIRAN 6

**SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT UTAMA BPS
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN**

Unit Kerja (1)	Jenjang Pendidikan					Total (7)
	s.d SMA (2)	D-III (3)	S1 (4)	S2 (5)	S3 (6)	
2000 Sekretaris Utama	-	-	-	-	1	1
2100 Biro Bina Program	2	3	20	24	1	50
2200 Biro Keuangan	17	12	32	17	-	78
2300 Biro kepegawaian	11	2	43	28	7	91
2400 Biro Humas dan Hukum	14	7	32	11	-	64
2500 Biro Umum	74	12	27	8	-	121
2600 Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15	5	22	29	2	73
2700 Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	17	1	12	71	11	112
Total	150	42	188	188	22	590

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta-10710

Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email : bpsHQ@bps.go.id